

Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2018-2024

Shinta Riana Putri¹, Liya Ermawati², Zathu Restie Utamie³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

putrishintariana@gmail.com¹, liyaermawati@radenintan.ac.id²,

zathu@radenintan.ac.id³

ABSTRACT

this study aims to analyze the impact of government spending including personnel expenditures, goods and services expenditures, and capital expenditures on economic growth in East Kalimantan Province from 2018 to 2024 from an Islamic economic perspective. This is an associative-causal study employing a quantitative approach. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The data were analyzed using panel data regression analysis. The number of observations used is 70, obtained from 7 regencies and 3 cities in East Kalimantan over the period 2018–2024. The results of the model selection tests the Chow test and the Hausman test indicate that the selected model is the Random Effects Model (REM). The results of the partial analysis indicate that the personnel expenditure variable has a probability value of $0.2437 > 0.05$, meaning that, in isolation, personnel expenditure does not have a significant effect on economic growth. Furthermore, the goods and services expenditure variable shows a probability value of $0.3194 > 0.05$, meaning that goods and services expenditure also does not have a significant effect on economic growth. As for capital expenditure, it shows a probability value of $0.0849 > 0.05$, indicating that capital expenditure also does not have a significant effect on economic growth in East Kalimantan. Meanwhile, simultaneously, personnel expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditure have an effect on economic growth with a probability value of $0.0380 < 0.05$.

Keywords: *personnel expenses, capital expenditures, goods and services expenses, economic growth.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018–2024 menurut perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data dianalisis menggunakan analisis regresi data panel. Jumlah observasi yang digunakan 70 yang diperoleh dari 7 kabupaten dan 3 kota Kalimantan timur dalam kurun waktu 2018-2024. Hasil uji pemilihan model yaitu uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel belanja pegawai memiliki nilai probabilitas $0.2437 > 0,05$, yang berarti bahwa secara persial belanj pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. selanjutnya, variabel belanja

barang dan jasa menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.3194 > 0,05$, yang artinya belanja barang dan jasa juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. adapun belanja modal yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0849 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa belanja modal juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan timur. Sementara secara simultan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar $0.0380 < 0,05$

Kata kunci: belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah karena mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang menunjukkan pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Peningkatan PDRB mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta meningkatnya kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan (Tumaleno dkk, 2022). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pada dasarnya, pembangunan merupakan upaya sadar manusia untuk mengubah kondisi yang dianggap kurang baik ke dalam keadaan yang lebih baik, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan yang merata bagi rakyat (Prastiwi dkk, 2025). Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem negara bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota berperan sebagai penggerak utama pembangunan, sedangkan pemerintah provinsi berfungsi sebagai koordinator dalam mengintegrasikan kebijakan antarwilayah.

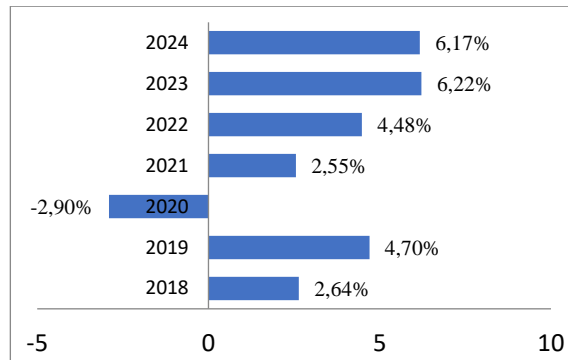
Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan otonomi daerah. Secara geografis, provinsi Kalimantan timur memiliki luas 126.981,279 km², Kalimantan timur menjadi provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Kalimantan tengah dan Kalimantan barat (BPS, 2025). Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Salah satu potensi daerah yang menonjol dan berdampak untuk pendapatan daerah, yaitu dari sektor unggulan seperti sektor pertambangan dan penggalan yang menjadi penopang utama ekonomi daerah (BPS, 2022).

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Pada Tahun 2018–2019, Menunjukkan Tren Positif Dengan Capaian 2,64%, Dan 4,70%, Seiring Membaiknya Harga Komoditas, Meningkatnya Produksi, Dan Menguatnya Ekspor Daerah. Pada

Tahun 2020, Perekonomian Kembali Terkontraksi Sebesar -2,90% Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Yang Menekan Hampir Seluruh Sektor Ekonomi. Pada Tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Mengalami Penurunan Sebesar 6,17 Persen Bila Dibandingkan Dengan Tahun 2023 Yang Tumbuh Sebesar 6,22 Persen. Selain Itu, Pertumbuhan Pada Regional Kalimantan Timur Lebih Tinggi Bila Dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan Dan Nasional Pada Tahun 2024 Yang Tumbuh Sebesar 5,52 Dan 5,03 Persen. Hal tersebut didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi, tingginya permintaan batu bara, serta faktor domestik dari adanya peningkatan belanja pemerintah dan peningkatan aktivitas konstruksi ikn dan konstruksi lainnya (BPS, 2025).

Gambar 2

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan timur tahun 2018-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

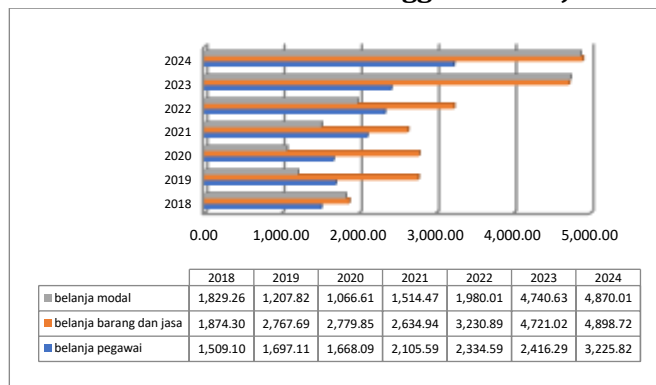
Perekonomian Kalimantan Timur masih dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor pertambangan mengarahkan perekonomian Kaltim menjadi sangat rentan terhadap dinamika global di tengah ketidakpastian. Pemerintah selaku regulator mempunyai berbagai kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan harga, karena kebijakan ini dapat mempengaruhi efek inflasi atau deflasi dalam suatu perekonomian, seperti operasi pasar, penerapan pajak dan subsidi (Mustika, 2024).

Peran pemerintah berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi oleh Keynes dan Harrod-Domar dinyatakan sangat berperan penting dalam melakukan berbagai kebijakan dengan melalui alokasi anggaran belanja daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Bonaraja, 2023). Menurut teori Ekonomi Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong permintaan agregat yang pada akhirnya meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi (Fatmawati, 2025). Menurut Keynes untuk melaksanakan kebijakan fiskal terdapat dua pendekatan yang dapat dilaksanakan pemerintah, yakni dengan income approach (dari pajak) serta expenditure approach (dari pengeluaran). Menurutnya, apabila pemerintah menurunkan pajak ataupun menaikkan pengeluaran akan menjadikan

perekonomian tumbuh secara baik (Rahim, 2025). Lulu Marisa Lumban Tobing, et.al, menyatakan bahwa pengeluaran publik yang ditujukan dengan tepat pada sektor-sektor produktif memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pengeluaran yang tidak terarah atau yang bersifat konsumtif seringkali tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya efek waktu, di mana dampak dari belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi tidak langsung tampak dalam jangka pendek, tetapi baru terlihat dalam jangka menengah hingga panjang (marisa, 2025).

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus dilaksanakan dengan perencanaan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan (Hafidzh, 2024). Berdasarkan publikasi resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari kenaikan nilai APBD dari sekitar Rp20,67 triliun menjadi Rp22,19 triliun pada perubahan APBD 2024, serta realisasi pendapatan daerah yang melampaui target hingga 104,07% (BPK, 2024).

Gambar 3. Realisasi anggran belanja



Sumber: Kemenkeu RI

Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan di Kalimantan Timur pada tahun 2024. Meskipun APBD Kalimantan timur mengalami peningkatan signifikan, namun efektivitas serapan dan distribusi tersebut masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, yang porsinya lebih besar dibandingkan belanja modal yang bersifat produktif. Dominasi belanja operasi tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belanja yang menyebabkan penggunaan anggaran belum efisien dan efektif (BPK, 2024). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi

ekonomi global. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan belanja pemerintah daerah tersebut.

Pada penelitian sebelumnya bahasan terkait belanja pemerintah telah banyak dilakukan namun terdapat perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Citra Etika, et al., yang menyatakan hasil belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Etika, 2022). Sementara penelitian Rendy Alvaro yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal (Alvaro, 2022). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irma Duwi Pusporini menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Pusporini, 2020). Sedangkan hasil penelitian Nadiyah Mawaddah et al., menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap PDRB (Mawaddah, 2024). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ruwina Rahmanda menyatakan bahwa belanja arang dan jasa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Rahmanda, 2025). Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Juwenda Siska Gosal Belanja barang dan jasa secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado (Gosal, 2022).

Penemuan-penemuan tersebut merupakan *research gap* dari penelitian ini, dan pembaruan yang membedakan terletak pada obyek penelitian ini yaitu pada provinsi Kalimantan timur dengan periode atau jangka waktu yang digunakan yaitu dari 2018-2024, serta dianalisis dalam perspektif ekonomi Islam yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas belanja pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang masih didominasi oleh sektor pertambangan dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi landasan etis dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan distribusi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan timur tahun 2018-2024 yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam secara parsial dan secara simultan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keynesian (Grand Theory)

Teori Keynesian merupakan teori makroekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes melalui karyanya "*The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936)*." Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan ekonomi klasik yang beranggapan bahwa mekanisme pasar mampu mencapai keseimbangan secara otomatis (self-adjusting). Keynes menyatakan untuk meningkatkan permintaan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran, sehingga akan lebih banyak barang yang diproduksi dan perekonomian akan baik. Permintaan akan menstimulus penawaran tidak sebaliknya sebab pilihan guna menaikkan PDB pada masa sulit sangat terbatas. Selain itu, melalui efek pengganda (multiplier effect), peningkatan belanja pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pendapatan nasional (Wibowo, 2020).

Perekonomian dapat berjalan maksimal jika ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Pendapat Keynes mengenai hal ini berimplikasi pada peran pemerintah dalam mengelola perekonomian demi menjamin kestabilan pertumbuhan, hal ini bisa dalam bentuk kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) ataupun dalam bentuk kebijakan fiskal (pajak dan belanja pemerintah) (Azwar, 2016). Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Dalam perekonomian tertutup permintaan agregat terdapat 3 unsur yaitu: Pengeluaran konsumsi rumah tangga, Pengeluaran investasi oleh perusahaan dan Pengeluaran pemerintah. Namun, dalam analisis Keynesian lanjutan, efektivitas pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada jenis dan sifat belanja tersebut. Pengeluaran yang bersifat produktif seperti investasi pemerintah akan memberikan dampak multiplier yang lebih besar terhadap perekonomian dibandingkan pengeluaran yang bersifat konsumtif atau rutin, karena belanja rutin cenderung hanya meningkatkan konsumsi jangka pendek tanpa menambah kapasitas produksi ekonomi.

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dalam konteks penelitian ini, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah (G). Belanja pegawai dan sebagian belanja barang dan jasa yang bersifat operasional cenderung memiliki efek multiplier yang lebih terbatas karena lebih banyak meningkatkan konsumsi jangka pendek dibandingkan kapasitas produksi. Sebaliknya, belanja modal memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena bersifat investasi publik yang meningkatkan produktivitas, memperluas infrastruktur ekonomi, serta mendorong investasi swasta. Dengan demikian, dalam perspektif Keynesian, perbedaan struktur belanja pemerintah menjadi faktor penting yang menentukan seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan yang ditempuh pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian. Pengeluaran pemerintah mencerminkan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa publik. Setiap keputusan pemerintah untuk melakukan pembelian barang dan jasa akan berimplikasi pada besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka merealisasikan kebijakan tersebut (Mankiw, 2007).

Pengeluaran pemerintah bersifat otonom karena penentuan anggaran pemerintah lebih pada pajak yang diharapkan akan diterima, pertimbangan politik dan permasalahan yang dihadapi (Mangkoesebroto, 2001). Pengeluaran pemerintah terbagi menjadi 2 macam yaitu: pengeluaran rutin, dimana pengeluaran ini di peruntukkan untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai belanja barang berbagai macam subsidi pembayaran angsuran dan bunga utang negara dan pengeluaran pembangunan Untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja negara dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan nasional.

Dalam Islam, konsep pengelolaan anggaran negara dikenal dengan istilah baitul maal yang menerapkan sistem balanced budget atau keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan keuangan negara dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, sehingga meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan seperti peperangan, stabilitas keuangan negara tetap terjaga. Belanja pemerintah dalam konteks islam sendiri tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk merealisasikan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan belanja pemerintah perlu dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab sosial negara.

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ini ditandai dengan meningkatnya output riil yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Menurut makroekonomi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan kenaikan produksi, tetapi juga mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, serta kesejahteraan ekonomi secara umum. Dalam konteks daerah, pertumbuhan ekonomi umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK), karena indikator ini mampu menggambarkan pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi perubahan harga.

Teori pertumbuhan ekonomi yang paling berpengaruh adalah model pertumbuhan neoklasik Solow-Swan. Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan tenaga kerja (*labor growth*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*), dengan asumsi skala hasil yang menurun (*diminishing returns*) (Solow, 1956). Dalam kondisi jangka panjang, perekonomian akan menuju titik keseimbangan (*steady state*), dimana pertumbuhan hanya dapat dipertahankan melalui kemajuan teknologi. Intervensi ini secara nyata disalurkan melalui anggaran belanja daerah yang terbagi menjadi tiga pos utama: Belanja Modal sebagai bentuk nyata dari *capital accumulation* (pembangunan infrastruktur). Belanja Pegawai sebagai instrumen penguatan *human capital* atau produktivitas labor (*birokrasi*). Serta Belanja Barang dan Jasa sebagai stimulus permintaan agregat jangka pendek sekaligus pemeliharaan modal fisik.

Namun, paradigma konvensional ini sering kali terjebak pada capaian material semata. Oleh karena itu, Teori Pertumbuhan Ekonomi Islam hadir sebagai pisau analisis korektif. Teori Pertumbuhan Ekonomi Islam yang bersumber dari pemikiran ekonomi klasik seperti Ibnu Khaldun (*Muqaddimah*) serta pemikir kontemporer seperti M. Umer Chapra memperluas definisi pertumbuhan ini. Islam memandang belanja pemerintah bukan sekadar variabel injeksi ekonomi ($\$G\$$ dalam makroekonomi), melainkan alat distribusi kekayaan yang wajib memenuhi *Maqashid Sharia*. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan berhasil bukan hanya ketika PDRB meningkat, tetapi ketika realisasi belanja modal, pegawai, dan barang/jasa mampu meminimalkan ketimpangan, menghindari perilaku mubazir (*tabzir*), dan menciptakan kesejahteraan yang merata (*falah*) bagi seluruh lapisan masyarakat (Rianto, 2010).

Belanja daerah

Menurut Bastian (2006) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pelayanan umum. Pengertian belanja menurut PSAP No.2 Paragraf 7 adalah “semua anggaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah” (Dilliana, 2022). Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah (Prasasti, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi.

Belanja pegawai

Berdasarkan PMK No. 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji termasuk tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan dalam bentuk uang atau barang baik pegawai yang berada didalam negeri maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk menjalankan program kerja dan kegiatan unit organisasi pemerintah (Kementerian Keuangan, 2026). Secara makroekonomi, belanja pegawai juga berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Peningkatan pendapatan pegawai akan mendorong permintaan agregat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila proporsi belanja pegawai terlalu besar dibandingkan belanja produktif lainnya, hal tersebut dapat mengurangi efektivitas anggaran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Dalam konteks pemerintahan, belanja pegawai tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja yang harus dilakukan secara amanah dan proporsional. Dengan demikian, pengelolaan belanja pegawai dalam Islam harus memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa dan biaya pemeliharaan aset negara (Kementerian Keuangan, 2026). Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Pengeluaran ini meliputi pembelian barang habis pakai, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, pembayaran jasa, serta kebutuhan operasional lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah.. Belanja barang dan jasa berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah karena mendukung kelancaran operasional pemerintahan yang berdampak pada peningkatan layanan publik dan aktivitas sektor ekonomi. Penggunaan anggaran yang efisien akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja modal

Halim (2008) mengatakan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja ini dikategorikan menjadi belanja tanah, belanja modal dan mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan,

Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya (Halim, 2008). Dalam ekonomi konvensional, belanja modal dipandang sebagai bentuk investasi publik yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Pembangunan infrastruktur melalui belanja modal dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, belanja modal sering dianggap sebagai pengeluaran produktif karena memiliki efek multiplier terhadap aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, belanja modal dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas publik demi terciptanya kemaslahatan masyarakat (masalah mursalah). Pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat menunjang kesejahteraan umat, seperti jalan, sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif-kausal dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dalam mengolah dan menganalisis data. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen serta menganalisis sebab-akibatnya. Populasi dalam penelitian ini seluruh laporan data belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebanyak 7 kabupaten dan 3 kota serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB tahun 2018-2024 di provinsi Kalimantan timur. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh (census sampling), yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan teknik tersebut, sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 observasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari situs resmi instansi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian keuangan RI, yang relevan dengan variabel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah Estimasi Data Panel yaitu uji chow, uji hausman, dan LM, kemudian uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), serta uji hipotesis berupa Uji t, uji F serta Uji Koefisien Determinasi (R^2). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB/Y)
- X1 : Belanja Pegawai
- X2 : Belanja Barang dan Jasa
- X3 : Belanja Modal
- α : Konstanta
- ϵ : Error term

i : jumlah observasi
 t : periode waktu
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu cara pengumpulan data, penelitian dan pengolahannya tanpa memberikan suatu kesimpulan (Andjarwati, 2021). Penyajian data statistik deskriptif biasanya dalam bentuk diagram atau tabel dan ukuran-ukuran statistik seperti mean median, dan modus. Tujuannya adalah menggambarkan atau merangkum karakteristik data tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas (Hamidi, 2024).

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	PE	BP	BBJ	BM
Mean	3.991143	6.527393	6.754870	6.656617
Median	3.935000	6.565272	6.687955	6.547172
Maximum	30.68000	7.616421	8.311484	8.578373
Minimum	-4.210000	5.038380	5.233886	5.383715
Std. Dev.	5.698595	0.601878	0.583353	0.719145
Skewness	2.636697	-0.632772	0.526283	0.619296
Kurtosis	13.42831	3.408273	3.700563	3.316429
Jarque-Bera	398.2953	5.157513	4.662828	4.766527
Probability	0.000000	0.075868	0.097158	0.092249
Sum	279.3800	456.9175	472.8409	465.9632
Sum Sq. Dev.	2240.705	24.99575	23.48079	35.68471
Observations	70	70	70	70

Diolah eviews 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki rata-rata sebesar 3,991143 dengan standar deviasi 5,698595, yang menunjukkan data cukup berfluktuasi. Nilai maksimum sebesar 30,68000 dan minimum -4,210000 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar selama periode penelitian. Nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,000000 < 0,05 menunjukkan data PE tidak berdistribusi normal. Variabel Belanja Pegawai (BP) memiliki rata-rata 6,527393 dengan standar deviasi 0,601878 sehingga data relatif homogen. Nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,075868 > 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. Variabel Belanja Barang dan Jasa (BBJ) memiliki rata-rata 6,754870 dengan standar deviasi 0,583353. Nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,097158 > 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. Variabel Belanja Modal (BM) memiliki rata-rata 6,656617 dengan standar deviasi 0,719145. Nilai

probability Jarque-Bera sebesar 0,092249 > 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal.

Pemilihan Uji Model Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji untuk menentukan modal terbaik yang digunakan dalam analisis data panel yaitu antara uji chow, uji hausman.

Uji chow

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.01017	(9,57)	0.0052
Cross-section Chi-square	27.2198	9	0.0013

Sumber: Eviews 13 (data diolah 2026)

Berdasarkan hasil Uji Chow (Redundant Fixed Effects), diperoleh nilai probabilitas Cross-section F dan Cross-section Chi-square <0,05. Oleh karena itu, model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji hausman

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.764866	3	0.0798

Sumber: Eviews 13 (data diolah 2026)

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probability sebesar 0,0798 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM), karena model tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan Fixed Effect Model (FEM). Sementara hasil uji Lagrange multiplier, menunjukkan bahwa Breusch-Pagan sebesar 3.192400 dengan nilai both 0.0223 <0,05. Yang menandakan bahwa model regresi yang terpilih adalah random effect model (REM).

Berdasarkan hasil Uji Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier (LM), menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM) dibandingkan Common Effect Model (CEM). Sehingga, model Random Effect Model (REM) merupakan model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga, persamaan regresi data panel yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PE = -11.0929415424 - 2.28298070026*BP + 1.79721047268*BBJ + 2.68095239431*BM + [CX=R]$$

Nilai konstanta sebesar -11,0929 menunjukkan bahwa apabila variabel Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal diasumsikan tetap atau bernilai nol, maka Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sebesar -11,0929. Nilai konstanta tersebut menggambarkan besarnya pengaruh faktor lain di luar model terhadap pertumbuhan ekonomi.

Koefisien regresi variabel Belanja Pegawai (BP) sebesar -2,2829 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Belanja Pegawai sebesar 1 persen akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,2829 persen, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (*ceteris paribus*). Hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pegawai yang bersifat konsumtif cenderung kurang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi produktif.

Koefisien regresi variabel Belanja Barang dan Jasa (BBJ) sebesar 1,7972 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Belanja Barang dan Jasa sebesar 1 persen akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,7972 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor barang dan jasa mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang maupun jasa.

Koefisien regresi variabel Belanja Modal (BM) sebesar 2,6809 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Belanja Modal sebesar 1 persen akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,6809 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa belanja modal yang dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik mampu meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.

Uji asumsi klasik

Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10, maka model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Uncentered Centered		
	Variance	VIF	VIF
C	73.29086	164.2606	NA
X1	13.68474	248.5380	2.065650
X2	14.26149	277.09737	2.022236
X3	12.43647	235.6266	2.679991

Sumber: Eviews 13 (diolah 2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai Centered VIF pada variabel X1 sebesar 2,065650, variabel X2 sebesar 2,022236, dan variabel X3 sebesar 2,679991. Seluruh nilai Centered VIF tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, antar variabel independen tidak memiliki hubungan linear yang tinggi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas artinya tidak boleh terjadi korelasi antara variabel pengganggu atau variabel sisa dengan masing-masing variabel-variabel independent. Pada penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji white. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.16867	Prob. F(3,66)	0.9171
Obs*R-squared	0.53261	Prob. Chi-Square(3)	0.9117
Scaled explained SS	3.24219	Prob. Chi-Square(3)	0.3558

Sumber: Eviews 13 (data diolah 2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0.53261, Prob. F sebesar 0.9117, dan Prob. Chi-Square (Scaled explained SS) sebesar 3.24219, yang seluruhnya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji hipotesis

Uji parsial (t)

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara masing masing variable independen terhadap variable dependen secara parsial. Berikut hasil uji t dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 7. Uji Parsial (t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.09294	10.75531	-1.031392	0.3061
BP	-2.282981	1.940807	-1.176305	0.2437
BBJ	1.797210	1.791297	1.003301	0.3194
BM	2.680952	1.532858	1.7489889	0.0849

Diolah: Eviews 13 (2026)

Berdasarkan pada hasil regresi data panel dengan metode random effect model (REM), hasil regresi menunjukkan bahwa variabel belanja pegawai memiliki nilai probabilitas $0.2437 > 0,05$, yang berarti bahwa secara persial belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. selanjutnya, variabel belanja barang dan jasa menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.3194 > 0,05$, yang artinya belanja barang dan jasa juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. adapun belanja modal yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0849 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa belanja modal juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan timur.

Uji f (simultan)

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variable independent berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen. Adapun hasil uji f dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	2.970353
Prob(F-statistic)	0.038068

Sumber: Eviews 13 (data diolah 2026)

Berdasarkan hasil uji F (simultan), diperoleh nilai F-statistic sebesar 2.970353 dengan nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0.038068 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga secara simultan variabel Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang dan Jasa (BBJ), dan Belanja Modal (BM) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dapat menunjukkan seberapa besar perubahan variasi variabel terikat dapat di jelaskan oleh perubahan variasi variabel bebas berikut hasil dari koefisien determinasi.

Tabel 9. Uji determinasi R^2

R-squared	0.118955
Adjusted R-squared	0.078908

Sumber: Eviews 13 (data diolah 2026)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,118955. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal mampu menjelaskan variasi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 11,89%, sedangkan sisanya sebesar 88,11% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Sementara itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,078908 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,89%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil uji t, variabel Belanja Pegawai (BP) memiliki nilai t-statistic sebesar -1,176305 dengan nilai probabilitas sebesar $0,2437 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018–2024. Secara empiris, kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pegawai belum mampu menjadi faktor pendorong utama peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur.

Secara teoritis, teori Keynesian menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan *aggregate demand* sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Keynes juga menekankan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah sangat ditentukan oleh produktivitas belanja tersebut. Pengeluaran yang bersifat produktif seperti investasi dan pembangunan infrastruktur akan memberikan multiplier effect yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin birokrasi (Ardhana, 2024). Oleh karena itu, apabila belanja pemerintah lebih banyak digunakan untuk pengeluaran administratif dibandingkan aktivitas produktif, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung lemah.

Kondisi tersebut sesuai dengan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan menyumbang 46,16% terhadap PDRB tahun 2024, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah lebih dipengaruhi oleh harga batu bara, ekspor, dan investasi dibandingkan konsumsi aparatur pemerintah (BPS, 2025). Struktur APBD Kalimantan Timur masih didominasi belanja operasional. Data DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja operasi Pemprov Kaltim tahun 2024 mencapai sekitar Rp9,33 triliun, sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp4,87 triliun (Pemprov, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk kebutuhan administratif birokrasi dibanding pembangunan sektor produktif.

Tidak signifikannya belanja pegawai juga terlihat pada masa pandemi tahun 2020. Meskipun pemerintah tetap mengalokasikan belanja pegawai dalam jumlah besar, ekonomi Kalimantan Timur tetap berkontraksi sebesar -2,90% akibat turunnya aktivitas pertambangan dan ekspor global. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada 2021–2024 karena kenaikan harga batu bara, investasi, dan pembangunan IKN, bukan karena peningkatan belanja pegawai. Hasil ini sejalan dengan teori pertumbuhan Solow yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi oleh investasi dan akumulasi modal dibanding pengeluaran konsumtif pemerintah (Boediono, 2012). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nadiyah Mawaddah et al. yang menyatakan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja pegawai lebih bersifat administratif dan konsumtif sehingga tidak mampu meningkatkan kapasitas produksi daerah secara langsung (Mawaddah, 2024). Serta

penelitian yang dilakukan oleh Ruwina Rahmanda et al. yang menyatakan bahwa Belanja pegawai berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan operasional dan pelayanan publik belum mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah (Rahmanda, 2025).

Dalam perspektif ekonomi islam belanja pegawai mencerminkan prinsip keadilan distribusi (al-'adl) dan pemenuhan hak pekerja (ujrah). Pemerintah berkewajiban memberikan imbalan yang layak kepada pegawai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka (Harahap, 2026). Belanja pegawai ini yang dimaksudkan berupa tunjangan dan kompensasi. Perlakuan yang profesional menjadi landasan dalam memberikan kompensasi dan tunjangan. Artinya, pemberian imbalan seharusnya sejalan dengan kinerja, kontribusi, serta kebutuhan masing-masing individu (Riski, 2023). Prinsip utama dalam kompensasi menurut syariah adalah keadilan dalam berbagi kekayaan. Artinya, pembayaran kompensasi harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, proporsionalitas, dan keadilan sebagai mana dalam Q.S An-nahl (16): 97 di mana setiap orang akan diberikan balasan yang lebih baik dari pada yang mereka kerjakan:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya "Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan".

Karuniawati (2022) menjelaskan bahwa kompensasi adalah upaya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak. Pekerja mendapatkan imbalan dari jeri payahnya yang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan individu atau keluarga dan pemberi kerja mendapatkan produktivitas atau kinerja sebagai ganti yang dapat membantu meringankan beban pemberi kerja (Karuniawati, 2022). Selain itu, dalam kerangka maqashid syariah, kebijakan belanja pegawai sejalan dengan upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) melalui pemenuhan kebutuhan hidup pegawai, serta menjaga harta (hifz al-mal) melalui pengelolaan anggaran publik yang bertanggung jawab. Namun, Islam juga menekankan prinsip efisiensi dan larangan berlebihan (israf), sehingga alokasi belanja pegawai harus tetap proporsional agar tidak membebani anggaran dan tetap memberikan dampak produktif terhadap ekonomi.

Pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi kaliantan timur

Berdasarkan hasil uji t, variabel Belanja Barang dan Jasa (BBJ) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,3194 > 0,05$ sehingga Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja barang dan jasa belum mampu memberikan dorongan yang optimal terhadap aktivitas ekonomi daerah. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar belanja barang dan jasa masih digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, seperti pemeliharaan,

perjalanan dinas, pengadaan barang administrasi, serta belanja penunjang birokrasi sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi daerah relatif terbatas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gosal, Lopian, dan Masloman (2022) yang menemukan bahwa belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Hal ini disebabkan karena sebagian besar belanja barang dan jasa masih bersifat operasional sehingga tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan output ekonomi daerah. Hal ini didukung oleh pernyataan Keynes mengenai belanja pemerintah yang efektivitas pengeluaran pemerintah sangat ditentukan oleh produktivitas belanja tersebut. Pengeluaran yang bersifat produktif seperti investasi dan pembangunan infrastruktur akan memberikan multiplier effect yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh Dwinta Fitrianty and Indah Lestari juga menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan (Fitrianty, 2024). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah pada komponen barang dan jasa cenderung belum mampu menjadi stimulus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena lebih banyak terserap pada kegiatan rutin birokrasi dibandingkan sektor produktif.

Dalam perspektif ekonomi Islam Sumber atau petunjuk dalam mengkonsumsi barang dan jasa di dunia ini telah tertera jelas di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67, yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Q.S. Al-Furqan: 67).

Pada ayat di atas dengan jelas menyebutkan, apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan sesuatu, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros, dan juga tidak boleh terlalu kikir (Bahren, 2020). Belanja barang dan jasa dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan publik (masalah ‘ammah) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Hibaturohman, 2024). Pengeluaran pemerintah dalam bentuk ini mencerminkan prinsip amanah dalam pengelolaan harta publik, di mana setiap anggaran harus diarahkan untuk kemaslahatan dan tidak boleh disalahgunakan. Selain itu, belanja barang dan jasa juga sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yaitu kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, selama tidak bertentangan dengan syariat (Rahmah, 2025).

Secara empiris, kondisi ini juga dapat diperkuat dengan karakteristik struktur APBD Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa lebih banyak dialokasikan pada belanja rutin perangkat daerah dibandingkan belanja yang bersifat produktif seperti peningkatan kualitas infrastruktur layanan publik atau penguatan sektor ekonomi daerah. Dominasi

belanja operasional tersebut menyebabkan rendahnya efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, karena dana yang dibelanjakan tidak secara langsung mengalir ke sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Keynes yang apabila belanja pemerintah lebih banyak dialokasikan pada belanja operasional. Selain itu, dalam konteks ekonomi daerah, belanja barang dan jasa yang bersifat konsumtif cenderung hanya menciptakan perputaran ekonomi jangka pendek di sektor jasa pemerintahan, tanpa memberikan dampak berkelanjutan terhadap peningkatan PDRB.

Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil uji t, variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0849 > 0,05$ sehingga Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik, perubahan belanja modal belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama periode penelitian.

Dalam perspektif ekonomi Islam, belanja modal merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana publik lainnya. Belanja modal tidak hanya dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan kesejahteraan masyarakat (falah). Oleh karena itu, pengalokasian belanja modal harus dilakukan secara efektif, efisien, adil, dan menghindari pemborosan (israf) agar mampu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat (Ariza, 2016).

Tidak signifikannya pengaruh belanja modal terhadap PDRB Kalimantan Timur periode 2018–2024 menunjukkan bahwa peningkatan investasi pemerintah belum sepenuhnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, karena struktur PDRB Kaltim masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebagai kontributor terbesar selama periode tersebut. Sementara itu, sektor konstruksi yang secara teoritis menjadi kanal utama penyerapan belanja modal hanya memiliki kontribusi jauh lebih kecil dibanding sektor ekstraktif, sehingga transmisi belanja modal terhadap output ekonomi menjadi terbatas.

Dari sisi fiskal, realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam APBD tercatat konsisten terealisasi tinggi, seperti tahun 2023 sebesar Rp5,02 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp4,87 triliun dengan tingkat serapan di atas 90 persen (DJPb, 2024). Namun, DJPb Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kontribusi investasi (PMTB) di Kalimantan Timur masih sangat dipengaruhi oleh proyek berskala nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga dampaknya terhadap ekonomi lokal bersifat bertahap dan belum sepenuhnya tercermin dalam PDRB daerah. Secara empiris, kondisi ini mencerminkan adanya *inefficiency of public capital expenditure*, karena peningkatan belanja modal tidak

diikuti peningkatan proporsional pada sektor konstruksi dan sektor produktif daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim 2024 sebesar 6,17 persen lebih banyak didorong oleh sektor pertambangan dan pengolahan, bukan oleh belanja pemerintah atau investasi infrastruktur daerah (BPS, 2024). Secara teoritis, hal ini menyimpang dari teori Keynesian yang menyatakan bahwa belanja modal pemerintah seharusnya meningkatkan output melalui efek multiplier, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas belanja dan keterkaitan antar sektor ekonomi. Dengan demikian, tidak signifikannya belanja modal terhadap PDRB Kalimantan Timur 2018–2024 merefleksikan lemahnya transmisi fiskal, dominasi struktur ekonomi berbasis sumber daya alam, serta keterbatasan keterkaitan belanja modal dengan sektor produktif daerah. Dalam perspektif ekonomi islam belanja modal

Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur (simultan)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-statistic sebesar 2,970353 dengan Prob (F-statistic) sebesar $0,038068 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel belanja pemerintah daerah memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara parsial terdapat variabel yang tidak signifikan, secara agregat pengeluaran pemerintah tetap berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat di daerah. Dengan demikian, pengaruh belanja pemerintah tidak dapat dianalisis secara parsial semata, karena secara agregat tetap berperan sebagai instrumen fiskal dalam mendorong permintaan total dan mendukung sektor-sektor dominan seperti pertambangan, industri pengolahan, dan investasi, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi material, tetapi juga pada pencapaian masalah (kemaslahatan publik), keadilan distributif, dan falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Pengelolaan pengeluaran negara dipandang sebagai amanah yang harus diarahkan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, bukan sekadar meningkatkan output ekonomi jangka pendek (Markavia, 2022). Oleh karena itu, efektivitas belanja pemerintah tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana alokasi anggaran tersebut mencerminkan prinsip efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil*”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan setiap manusia, terutama pemimpin atau pihak yang diberi tanggung jawab, untuk menjalankan amanah dengan jujur, tepat, dan adil. Amanah dalam konteks ini dapat berupa harta, jabatan, kekuasaan, maupun tanggung jawab dalam mengelola urusan masyarakat. Selain itu, Allah juga menegaskan bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan pada prinsip keadilan, tanpa memihak dan tidak merugikan pihak lain. Dalam perspektif ekonomi Islam, ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan keuangan negara, termasuk belanja pemerintah, harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat. Anggaran negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus dialokasikan secara adil agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang merata.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nadiyah Mawaddah et al., yang menyatakan bahwa belanja pegawai, belanja odal dan belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Mawaddah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) tidak dapat dilihat secara terpisah, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan fiskal daerah. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis belanja pemerintah saja, tetapi oleh kombinasi dan sinergi antarbelanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Belanja pegawai, misalnya, berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui pendapatan aparatur pemerintah yang kemudian mendorong konsumsi rumah tangga. Belanja modal berfungsi menyediakan infrastruktur dan sarana publik yang mendukung produktivitas ekonomi, sedangkan belanja barang dan jasa membantu kelancaran pelayanan publik serta aktivitas operasional pemerintah. Ketika ketiga jenis belanja tersebut dialokasikan secara bersamaan, maka akan tercipta efek multiplier terhadap perekonomian daerah, seperti meningkatnya konsumsi, investasi, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas produksi masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan pengaruh simultan variabel X terhadap variabel Y menjadi signifikan.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan instrumen fiskal yang dapat mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengeluaran pemerintah juga dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (masalah) melalui pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan penyediaan pelayanan publik yang efektif. Oleh karena itu, meskipun masing-masing jenis belanja belum mampu memberikan pengaruh signifikan secara individual, kombinasi seluruh belanja pemerintah tetap mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, secara parsial Belanja Pegawai (BP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, dengan koefisien -2,282981 dan probabilitas 0,2437 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Pegawai belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Belanja Barang dan Jasa (BBJ) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien 1,797210 dan probabilitas 0,3194 ($> 0,05$), yang mengindikasikan bahwa dampaknya masih terbatas karena dominasi belanja operasional. Belanja Modal (BM) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien 2,680952 dan probabilitas 0,0849 ($> 0,05$), sehingga belum cukup kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara statistik. Namun secara Simultan (uji f) diperoleh nilai F-statistic sebesar 2.970353 dengan probabilitas 0.038068 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang dan Jasa (BBJ), dan Belanja Modal (BM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur secara parsial masih belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara bersama-sama belanja pemerintah tetap memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas belanja daerah tidak hanya ditentukan oleh satu jenis belanja tertentu, tetapi dipengaruhi oleh sinergi dan kualitas alokasi anggaran secara keseluruhan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Hal tersebut disebabkan oleh dominasi belanja operasional, belum optimalnya alokasi belanja produktif, serta tingginya ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor pertambangan yang lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar global.

Saran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal secara proporsional, efisien, dan produktif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan APBD perlu difokuskan pada penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sehingga setiap pengeluaran memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta produktivitas ekonomi, dengan tetap mengendalikan dominasi belanja operasional agar ruang fiskal untuk belanja produktif semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Angga Somantri, Muslimin, Et Al. "Government Financial Management Review: The Impact Of Government Spending And Budget Surplus (Silpa) On Regional Development." *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 10, No. 3 (2025): 188–205.
- Al-Arif, M. N. R. (2010). *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Andjarwati T., et al., statistik deskriptif (zifatama jawara, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=PWMzEAAAQBAJ>.
- Anggatia Ariza. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Perspektif Islam." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 1, No. 4 (2016): 1–21.
- Ardhana, Muhammad Bagas, et al. (2024). "Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonom." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(June): 76–83.
- Ariza, Anggatia. (2016). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Perspektif Islam." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 1(4): 1–21.
- Aruan, Bonaraja Nur Indah Melani, Irma Hutagalung, and Purba. (2023). "Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1(1): 1–7.
- Azwar, Azwar. "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia." *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 20 (August 1, 2016): 149–167.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Samarinda: JDIIH BPK Database Peraturan.
- Badan, Pusat Statistik. "Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan Iv-2024," 2025. <https://kaltim.bps.go.id/Id/Pressrelease/2025/02/05/1139/Pertumbuhan-Ekonomi-Provinsi-Kalimantan-Timur-Triwulan-Iv-2024.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2022, (BPS Kalimantan Timur, 2022).
- Badan Pusat Statistik (Bps). "Laju Pertumbuhan Pdrb Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha." Samarinda, 2026. <https://kaltim.bps.go.id/Id/Publication/2025/02/28/2fd1ffbcf042aa223f3b9b25/Provinsi-Kalimantan-Timur-Dalam-Angka-2025.html>.
- Bahren, Rina Susanti Abidin. "Pengaruh Iman Terhadap Konsumsi Barang Atau Jasa." *The Renewal Of Islamic Economic Law* 1, No. 1 (2020): 52–73.
- Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi (Yogyakarta: BPFE, 2012).
- Bonaraja Purba, Meisha Fatma Wijaya, Monalisa Lumbantobing, Muhammad Bagas Ardhana. "Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian Dan Kebijakan Pemerintah

- Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonom." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. June (2024): 76–83.
- Citra Etika, Rachmania, Meti Elisa Pitri. "Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung." *Journal Of Economic, Business And Accounting* 6 (2022): 1052–1058.
- Dedi zainudin hamidi, and mohzana, "statistik dasar" (aksara sastra media, 2024).
- Fatmawati, Linda, Angga Rosidin, Zakaria Habib, And Al- Ra. "Mengembangkan Teori Keynesian Untuk Menghadapi Tantangan Ekonomi Masa Depan." *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, No. 2 (2025): 757–767. <https://Paperity.Org/P/339533202/Pemikiran-Ekonomi-Politik-Keynesian-Dan-Kebijakan-Pemerintah-Dalam-Mendorong-Pertumbuhan>.
- Fitrianty, Dwinta, And Indah Lestari. "Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 24, No. 1 (2024): 18–32.
- Hafidzh, Faiq Akmaluddin. "Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 6, No. 5 (2024): 1363–1373. <https://Jurnal.Ranahresearch.Com/Index.Php/R2j>.
- Harahap, Ira Damayanti, And Muhammad Yafiz. "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Upah Dan Kesejahteraan Pekerja Indonesia." *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)* 5, No. 1 (2026): 1281–1288.
- Iib Hibaturohman, Dena Ayu. "Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern : Prespektif Ekonomi Islam The Concept Of Masalah Mursalah In Facing Economic Inequality In The Modern Era : An Islamic Economic Perspective." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 26–36.
- Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Republik. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (Ihpd) Tahun 2024." Samarinda: Badan Pengawas Keuangan (Bpk), 2025. <https://Kaltim.Bpk.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2025/08/Ihpd-2024-Prov-Kaltim-2105-Rev22052025-16.40.Pdf>.
- Indonesia, Bank. "Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur," 2025.
- Imam ghozali, aplikasi analisis multivariate dengan spss 25 edisi 9, universitas diponegoro, (semarang: 2018) 490 hlm.
- Irma Dwi Pusporini. "Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Di Provinsi Jawa Tengah." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 9, No. 6 (2020): 485–508.
- Juwenda Siska Gosal, Agnes Lutherani Ch. P. Lopian, Irawaty Masloman. "Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado Tahun 2005-2021." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, No. 5 (2022): 85–96.
- Keuangan, Badan Pemeriksa. "Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024.” Samarinda: Jdih Bpk Database Peraturan, 2024.
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/323892/Perda-Prov-Kalimantan-Timur-No-8-Tahun-2024>.

- Karuniawati. C., “Bentuk dan Jenis Kompensasi Perspektif Islam,” *At-Tasyri’: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2022): 31–42, <https://doi.org/10.55380/tasyri.v2i02.213>. Marisa, Lulu, Lumban Tobing, And Nada Aiyskamila Ramadani. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ekonomi Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 4 (2025): 297–306.
- Markavia, Reisa Nadika, Fidzri Nur Febriani, And Fitri Nur Latifah. “Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” No. April (2022): 81–91.
- Mawaddah, Nadiyah, Putri Kemala, Dewi Lubis, And Rizky Fadly. “Analisis Pengaruh Belanja Pegawai , Belanja Barang Dan Jasa , Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Medan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. June (2024): 598–605.
- Nur Indah Melani Aruan, Irma Hutagalung, Bonaraja, And Purba. “Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1, No. 1 (2023): 1–7.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Gubernur Kalimantan Timur 2024,” 2024.
- Prastiwi, Indah Wahyu, Dinda Amalia, Siti Khairani, Universitas Islam, And Negeri Sumatera. “Teori-Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi.” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (2025).
- Rahim, Aulia, et al. (2025). “Government Financial Management Review: The Impact Of Government Spending And Budget Surplus (Silpa) On Regional Development.” *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 10(3): 188–205.
- Rahmah, Syahidah, Sarah Zettira, And Agam Darwis. “Maslahah Mursalah In Islamic Economic Philosophy.” *International Journal Of Sharia Business Management (Ijsbm)* 4, No. 1 (2025): 11–16.
- Rahmanda, Ruwina, Reisyah Andini, Chesia Rika, Adrilia Br, Vincensius Maruli, Tua Malau, And Andryno Toty. “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)* 4, No. 4 (2025): 2413–2423.
- Rendy Alvaro. “Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dbh, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Daerah Tertinggal.” *Jurnal Budget* 7 (2022): 256–276.
- Riski, Wesiur, And Ilham Maulana. “Kompensasi Dan Tunjangan Dalam Perspektif Manajemen Syariah : Upaya Meningkatkan Keadilan” 1, No. 2 (2023): 68–77.
- Sari, Fitri Mustika, Asti Astuti, Davia Zamanda, Fairuz Prama Restu, And Arif Fadilla. “Kebijakan Fiskal Dan Perekonomian Indonesia Dampaknya Terhadap.” *Journal Of Economics, Assets, And Evaluation* 1, No. 4 (2024): 1–10.
- Statistik, Badan Pusat. “Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2019.”

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 7 (2026) 3365 – 3390 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12342

Samarinda, 2020.

Solow, Robert M. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth." *The Quarterly Journal of Economics* 70(1): 65–94.

Tumaleno, Ayu Fatmasari, Kartina Rusti Riazis, And Rosnawintang. "Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Sulawesi Tenggara." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, No. 3 (2022): 189–195.

Wibowo, Agus. *Pengantar Ekonomi Makro*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2020.